

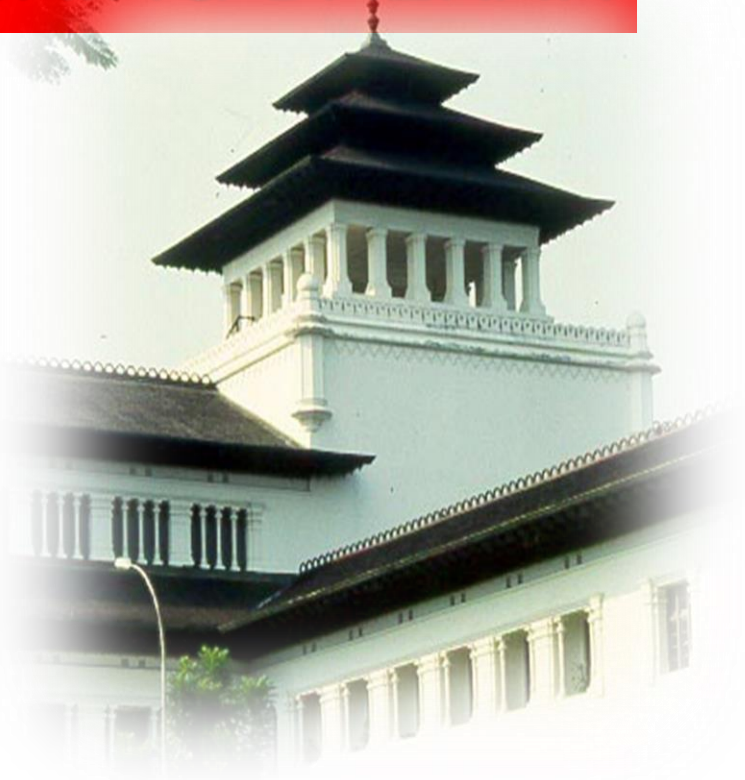


INOVASI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN DAYA SAING DAERAH

Disampaikan oleh:

Dewi Gartika, SSi, MSi
Peneliti Ahli Madya

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



DEFINISI

Menurut Rogers (2003), inovasi adalah sebuah **ide; praktek; atau objek** yang dianggap **baru** oleh individu satu unit adopsi lainnya

ATRIBUT

Atribut Inovasi:

1. **Keuntungan Relatif** (mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya)
2. **Kesesuaian dengan inovasi yang digantinya**
3. Kerumitan
4. Kemungkinan Dicoba
5. Kemudahan diamati

Wibisono (2006) mengemukakan cara yang paling mudah untuk mendeteksi keberhasilan inovasi adalah melalui pengecekan didapatkannya pelanggan baru (*akuisisi pelanggan*), pertumbuhan penjualan, loyalitas pelanggan, dan peningkatan margin keuntungan.

Hambatan Inovasi



Sumber : Albury, 2003. hal 31

FAKTOR YANG MENENTUKAN KEBERHASILAN DIFUSI INOVASI

1. KARAKTERISTIK INOVASI (Produk).

Sebuah produk baru dapat dengan mudah diterima oleh konsumen (masyarakat) jika produk tersebut mempunyai **keunggulan relatif**. Artinya produk baru akan menarik konsumen jika produk tersebut **mempunyai kelebihan** dibandingkan produk-produk yang sudah ada sebelumnya di pasar, mampu memenuhi kebutuhan, nilai-nilai, dan keinginan konsumen secara konsisten, mudah digunakan

2. SALURAN KOMUNIKASI.

Inovasi akan **menyebar pada konsumen** yang ada di masyarakat melalui saluran komunikasi yang ada

3. UPAYA PERUBAHAN DARI AGEN.

Perusahaan harus mampu mengidentifikasi secara tepat **opinion leader untuk mempengaruhi konsumen** atau masyarakat dalam menerima dan menggunakan produk baru (inovasi).

4. SISTEM SOSIAL .

Pada umumnya sistem sosial **masyarakat modern lebih mudah menerima inovasi** (Rogers, 2003)



bp2d.jabarprov.go.id



@bp2djabar



@bp2djabar



@bp2djabar

KETERKAITAN INOVASI DAN TPB

TUJUAN 9



MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH,
MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA
MENDORONG INOVASI

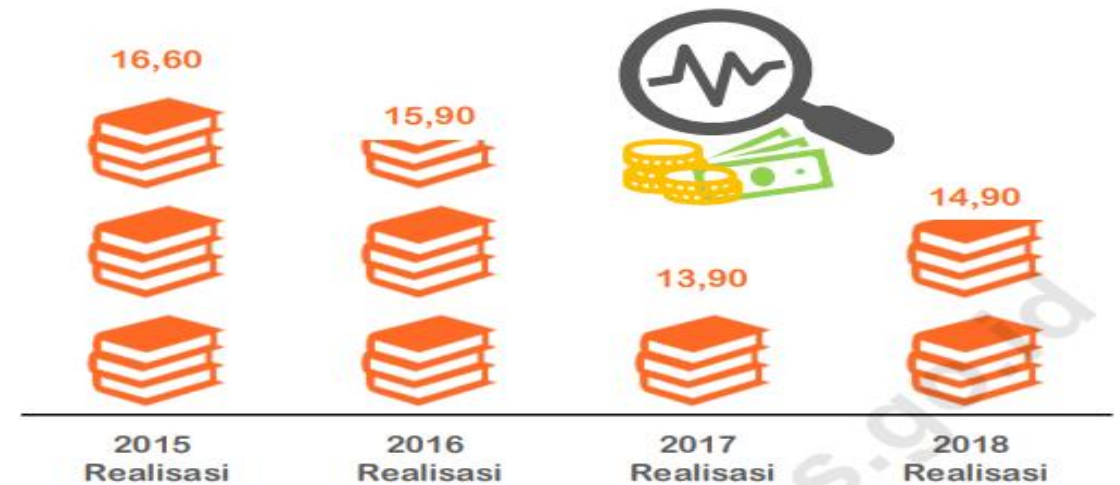


TARGET 9.5.

MEMPERKUAT RISET ILMIAH, MENINGKATKAN KAPABILITAS TEKNOLOGI SEKTOR INDUSTRI DI SEMUA NEGARA, TERUTAMA NEGARA-NEGARA BERKEMBANG, TERMASUK PADA TAHUN 2030, MENDORONG INOVASI DAN SECARA SUBSTANSIAL MENINGKATKAN JUMLAH PEKERJA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PER 1 JUTA ORANG DAN MENINGKATKAN PEMBELANJAAN PUBLIK DAN SWASTA UNTUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

Untuk memberikan inovasi yang berdaya guna, riset perlu dilakukan, akan tetapi kendala biaya riset yang cukup besar membuat aspek inovasi sulit untuk diterapkan. Keberadaan riset dan dukungan ilmu pengetahuan serta teknologi juga dapat meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam hal ekonomi agar industrialisasi di Indonesia menjadi inklusif dan berkelanjutan. Saat ini, proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB Indonesia dari tahun 2015 sampai 2018 cenderung menurun

PROPORSI ANGGARAN RISET PEMERINTAH TERHADAP PDB, 2015-2018



KETERKAITAN INOVASI DAN DAYA SAING

INOVASI MERUPAKAN SALAH SATU PARAMETER DALAM PENGUKURAN DAYA SAING.

IDSD :

- Menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan, baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.
- Dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah



KEBIJAKAN INOVASI DAERAH

UU 23/2014
TTG PEMDA

KDH melaporkan Inovasi Daerah kepada Mendagri untuk dilakukan penilaian dengan melibatkan lembaga yang berkaitan dengan litbang (Pasal 388 ayat (7), (9), (10))



Pemerintah Pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemda yang berhasil melaksanakan inovasi (Pasal 388 ayat (11))

UU 11/2019
TTG SINASIPTEK

Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan utk menghasilkan Inovensi dan Inovasi (Pasal 3 huruf a)

PP 12/2017
TTG BINWAS

Pembinaan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara lain meliputi kebijakan daerah dan kerjasama daerah (Pasal 3 yata (2))



Litbang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hasil Litbang dijadikan dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 8 ayat (1) & (4)

PP 38/2017
TTG INOVASI DAERAH

Kemendagri melakukan penilaian terhadap Pemda yg melaksanakan Inovasi Daerah (Pasal 22 dan 24)



Penilaian inovasi daerah dilakukan dengan mempertimbangkan laporan penerapan Inovasi Daerah yang dilakukan dengan mekanisme pengisian data Indeks Inovasi Daerah (Pasal 4)

PERMENDAGRI
104/2018

Pemberian penghargaan dan/ atau insentif Inovasi Daerah berdasarkan hasil penilaian Inovasi Daerah (Pasal 25)



bp2d.jabarprov.go.id



@bp2djabar



@bp2djabar



@bp2djabar

KRITERIA, BENTUK DAN PENILAIAN INDEKS INOVASI DAERAH

PP 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

BENTUK INOVASI DAERAH

TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Inovasi tata laksana internal, fungsi manajemen, dan pengelolaan unsur manajemen

PELAYANAN PUBLIK

Inovasi proses pemberian layanan barang/jasa publik

INOVASI DALAM BENTUK LAINNYA

inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

KRITERIA PENILAIAN

- 1 PEMBAHARUAN
- 2 MANFAAT
- 3 KEPENTINGAN PUBLIK
- 4 URUSAN DAN KEWENANGAN PEMDA
- 5 REPLIKASI/APLIKATIF

METODE PENILAIAN

Skor Indeks Inovasi Daerah
$$= ((\sum ISP) \times \text{bobot}) + (\sum Id1 + \sum Id2 + \sum Id\infty) \times \text{bobot}$$

Keterangan:

IID = Indeks Inovasi Daerah

ISP = Indikator Satuan Pemda

Id = Inovasi Daerah

Σ . = Jumlah

∞ = Tak terhingga

Skor dan Predikat

0 = Belum Mengisi Data

1-500 = Kurang Inovatif

501-1000 = Inovatif

>1001 = Terinovatif



bp2d.jabarprov.go.id



@bp2djabar



@bp2djabar



@bp2djabar

INOVASI DAERAH DISELENGGARAKAN BERDASARKAN PRINSIP

- a. Peningkatan efisiensi;
- b. Perbaikan efektivitas;
- c. Perbaikan kualitas pelayanan;
- d. Tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. Berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. Dilakukan secara terbuka;
- g. Memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya dan tidak untuk kepentingan diri sendiri



bp2d.jabarprov.go.id



@bp2djabar



@bp2djabar



@bp2djabar

ASPEK, VARIABEL, DAN INDIKATOR INDEKS INOVASI DAERAH



bp2d.jabarprov.go.id



@bp2djabar



@bp2djabar



@bp2djabar

PARAMETER PENILAIAN

INDIKATOR SATUAN PEMERINTAHAN DAERAH (1)

INDIKATOR	KETERANGAN	BOBOT	NILAI 0	NILAI 1	NILAI 2	NILAI 3
			Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Parameter 4
1. Visi Misi	Komitmen KDH dirumuskan dalam RPJMD	3	Data Belum Tersedia	Kepala Daerah memiliki Visi Inovasi	Kepala Daerah memiliki Misi Inovasi	Kepala Daerah memiliki Visi dan Misi Inovasi
2. Tingkat Lembaga Kelitbangan	Tingkatan struktur Badan litbang daerah	4	Data Belum Tersedia	Unit litbang ditangani setara Eselon IV	Unit litbang ditangani setara Eselon III	Unit litbang ditangani setara Eselon II
3. Jumlah Inovasi Daerah	jumlah inovasi daerah yang dihasilkan	3	Data Belum Tersedia	1-75 Inovasi	76-150 Inovasi	>151
4. Kualitas Peningkatan Perizinan	Peningkatan persentase jumlah izin DPMPTSP	2	Data Belum Tersedia	1-3 %	4-6 %	>7%
5. Jumlah Pendapatan Perkapita	Peningkatan Besarnya pendapatan rata rata penduduk	2	Data Belum Tersedia	1-3,99%	4-5,99 %	>6%
6. Jumlah Lapangan Kerja	Peningkatan Ketersediaan lapangan kerja di suatu daerah	2	Data Belum Tersedia	1-5 %	6-10 %	>11 %
7. Jumlah Peningkatan Investasi	Jumlah peningkatan invesitasi di daerah.	2	Data Belum Tersedia	1-2,99 %	3-5,99%	>6%



bp2d.jabarprov.go.id



@bp2djabar



@bp2djabar



@bp2djabar

INDIKATOR	KETERANGAN	BOBOT	NILAI 0	NILAI 1	NILAI 2	NILAI 3
			Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Parameter 4
8. Jumlah Peningkatan PAD	Jumlah peningkatan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah.	2	Data Belum Tersedia	1-5 %	6-10 %	11% keatas
9. Opini BPK	Hasil pendapat dari laporan pemeriksaan keuangan oleh BPK	2	Data Belum Tersedia	TMP/Disclaimer Opinion dan TW/Adverse Opinion	WDP/Qualified Opinion	WTP/unqualified Opinion
10. Nilai Capaian Lakip	Produk akhir sakis yang dicapai oleh pemerintahan daerah.	2	Data Belum Tersedia	Nilai LAKIP kisaran D dan C Tahun terakhir	Nilai LAKIP kisaran B Tahun terakhir	Nilai LAKIP kisaran A Tahun terakhir
11. Nilai IPM	Perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup di daerah	2	Data Belum Tersedia	0,1 hingga 0,499	0,500 hingga 0,699	0,700 ke atas
12. Penghargaan Bagi Inovator	Penghargaan/ Ganjaran yang diberikan untuk memotivasi inovator dengan produktivitas tinggi.	2	Data Belum Tersedia	Pemberian Piagam Penghargaan	Pemberian Piagam Penghargaan dan Reward/insentif	Pemberian Piagam Penghargaan ,insentif serta menerapkan ide inovasinya
13. Optimalisasi CSR	Dukungan anggaran CSR untuk inovasi daerah.	1	Data Belum Tersedia	1-2 kerjasama	3-5 kerjasama	>5 Kerjasama
14. Roadmap SiDA	Peta Jalan sistem inovasi daerah	1	Data Belum Tersedia	Masih berbentuk rancangan dokumen SiDA	Telah membuat dokumen SiDA yang telah disepakati	Telah membuat dokumen SiDA dan ditetapkan dalam Perkada



PARAMETER PENILAIAN

INDIKATOR SATUAN INOVASI DAERAH

INDIKATOR	KETERANGAN	BOBOT	NILAI 0	NILAI 1	NILAI 2	NILAI 3
			Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Parameter 4
15. Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi yang ditetapkan untuk mendukung Inovasi	7	Data Belum Tersedia	SK OPD/SK KDH	Perkada	Perda
16. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Jumlah SDM yang melaksanakan inovasi	3	Data Belum Tersedia	1-10 SDM	11-30 SDM	Lebih dari 31 keatas
17. Dukungan Anggaran	Anggaran untuk inovasi daerah dalam APBD	5	Data Belum Tersedia	Anggaran kegiatan inovasi dalam tahap perencanaan	Anggaran kegiatan inovasi tahap pelaksanaan	Anggaran kegiatan inovasi telah dilaksanakan dan di evaluasi
18. Penggunaan IT	Penggunaan TIK	2	Data Belum Tersedia	Pelaksanaan kerja secara manual	Pelaksanaan kerja secara elektronik	Pelaksanaan kerja sudah didukung system informasi online/ daring
19. Bimtek Inovasi	Pelatihan dalam meningkatkan inovasi daerah	3	Data Belum Tersedia	Pernah 1 tahun 2 Kali melakukan Bimtek	Pernah 2 tahun 4 Kali melakukan Bimtek	Pernah 3 tahun 9 Kali melakukan Bimtek
20. Program dan Kegiatan Inovasi OPD dalam Renstra	Inovasi OPD masuk dalam program kegiatan Renstra	4	Data Belum Tersedia	Pemerintah daerah menuangkan "rencana" pengembangan inovasi dalam Renstra	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Renstra	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Renstra dan telah dilaksanakan



bp2d.jabarprov.go.id



@bp2djabar



@bp2djabar



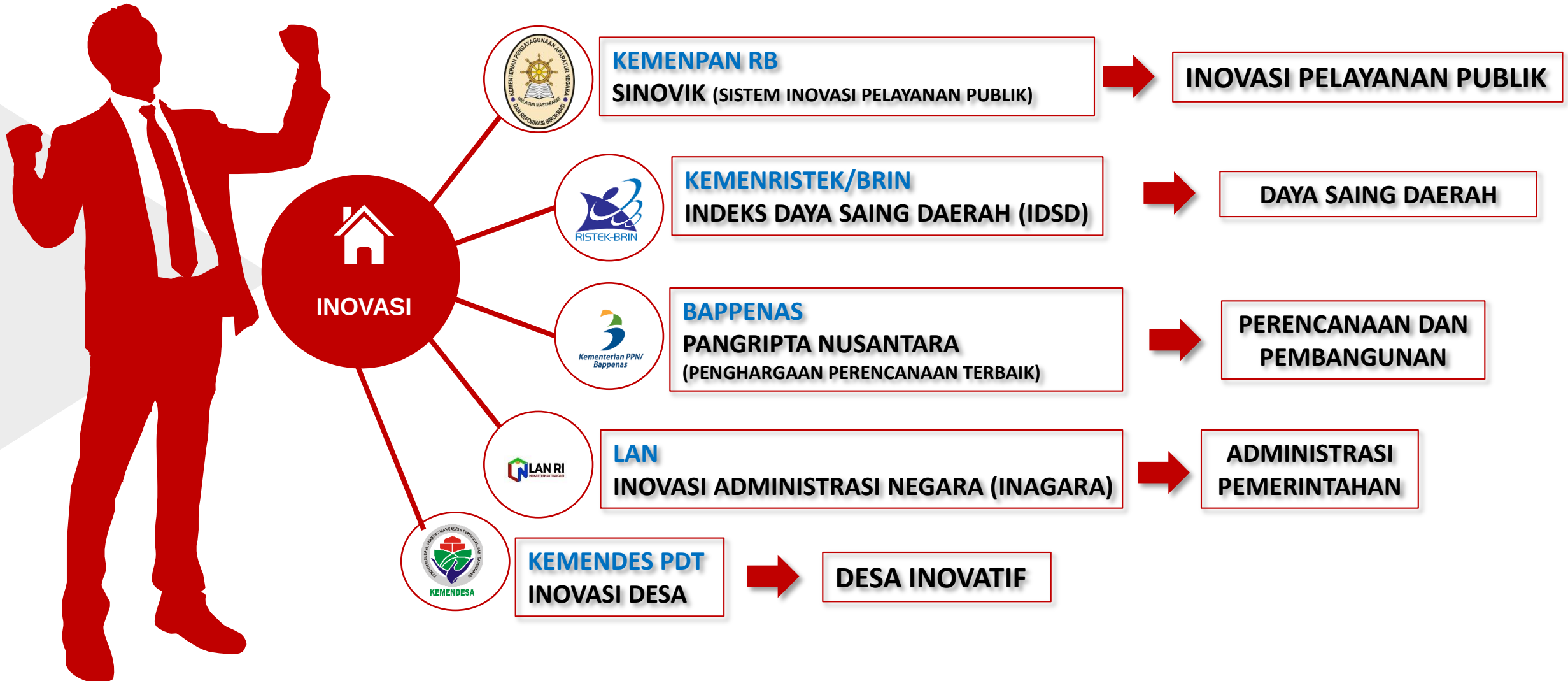
@bp2djabar

INDIKATOR	KETERANGAN	BOBOT	NILAI 0	NILAI 1	NILAI 2	NILAI 3
			Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Parameter 4
21. Tingkat Partisipasi Stakeholder	Keikutsertaan kegiatan inovasi daerah	2	Data Belum Tersedia	Inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat	Pelibatan masyarakat dan akademisi	Pelibatan masyarakat dan akademisi serta media massa
22. Pengelola Inovasi Daerah	SDM Pengelola inovasi	2	Data Belum Tersedia	Ada Pengelola namun tidak ditetapkan dengan SK OPD	Ada pengelola dan ditetapkan dengan SK OPD	Ada pengelola dan ditetapkan dengan SK kepala daerah
23. Kecepatan Inovasi	Proses yang digunakan untuk mengakses inovasi daerah dalam satuan waktu.	2	Data Belum Tersedia	Proses inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 8 hari keatas	Proses inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 3-7 hari	Proses inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 1-2 hari
24. Pedoman Teknis	Ketentuan dasar penggunaan inovasi	2	Data Belum Tersedia	Terdapat "Rancangan" Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman Teknis dan dapat diakses secara online
25. Ketersediaan Layanan Informasi	Kesiapan informasi layanan	2	Data Belum Tersedia	Informasi melalui datang langsung	Informasi diakses melalui telp	Informasi layanan dapat diakses secara online
26. Kemudahan Informasi Layanan	Tidak memerlukan banyak tenaga untuk memperoleh informasi layanan	2	Data Belum Tersedia	Layanan Telp	Layanan Email/Media Sosial	Layanan melalui Aplikasi Online
27. Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Tidak memerlukan banyak tenaga untuk melakukan inovasi	4	Data Belum Tersedia	Hasil inovasi dapat dihasilkan dalam waktu hitungan 8 hari keatas	Hasil inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 3-7 hari	Hasil inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 1-2 hari

INDIKATOR	KETERANGAN	BOBOT	NILAI 0	NILAI 1	NILAI 2	NILAI 3
			Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Parameter 4
28. Penyelesaian Layanan Pengaduan	Penyelesaian kendala inovasi	2	Data Belum Tersedia	Terdapat "call center" layanan pengaduan pengguna	Terdapat layanan pengaduan pengguna melalui "media sosial"	Terdapat layanan pengaduan pengguna melalui aplikasi pengaduan
29. Online Sistem	Jaringan prosedur yang dibuat secara daring	4	Data Belum Tersedia	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Ada dukungan melalui web aplikasi	Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)
30. Replikasi	Replikasi Inovasi ke daerah lain	2	Data Belum Tersedia	Pernah 1 Kali di replikasi di daerah lain	Pernah 2 Kali di replikasi di daerah lain	Pernah 3 Kali di replikasi di daerah lain
31. Jejaring Inovasi	Interaksi antar pelaku dan atau Instansi inovasi daerah serta antar daerah.	2	Data Belum Tersedia	Inovasi hanya berjalan 1 OPD dalam 1 daerah	Inovasi berjalan 2 atau lebih OPD dalam 1 daerah	Inovasi berjalan antar OPD dan antar daerah
32. Sosialisasi Inovasi	Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah	3	Data Belum Tersedia	-	-	ada Foto
33. Kemanfaatan Inovasi	Bermanfaat dan tidak menimbulkan pembenangan daerah	7	Data Belum Tersedia	Hasil manfaatnya dirasakan 1-100 orang	Hasil manfaatnya dirasakan 100-200 orang	Hasil manfaatnya dirasakan diatas 201 orang keta
34. Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah	4	Data Belum Tersedia	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari "testimoni pengguna"	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari hasil penelitian
35. Kualitas Inovasi Daerah	Kualitas inovasi Daerah dapat dibuktikan dengan video inovasi daerah	6	Data Belum Tersedia	-	-	ada Video



PENGHARGAAN INOVASI KEMENTERIAN/LEMBAGA



BAGAIMANA AGAR INOVASI TUMBUH DAN BERKEMBANG ???



IKLIM INOVASI





EKOSISTEM INOVASI DAERAH	INTERAKSI DAN KEBERAGAMAN	Implementasi Program SISTEM INOVASI DAERAH
		Keberadaan dan PENGEMBANGAN KLASSTER INOVASI BERBASIS PRODUK UNGGULAN DAERAH (PUD) sebagai bentuk interaksi dan kolaborasi antara Pemerintah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan atau Lembaga Litbang dan Masyarakat
		Jumlah KOLABORASI antara perguruan tinggi, Lembaga dan atau litbang dengan pemerintah daerah dalam program pengembangan teknologi dan inovasi
		Jumlah perjanjian KERJA SAMA ANTARA INDUSTRI/DUNIA USAHA dengan Pemerintah Daerah dalam program pengembangan teknologi dan inovasi
		Jumlah kolaborasi antara perguruan tinggi dan atau Lembaga litbang, industri/dunia usaha dan pemerintah daerah (TRIPLE HELIX) dalam program pengembangan teknologi dan inovasi
		Hasil INDEKS INOVASI DAERAH
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Jumlah artikel ilmiah jurnal yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi dan atau lembaga litbang
		Jumlah yang masuk Kekayaan Intelektual (paten, merek, cipta, dan design Industri) secara keseluruhan yang dihasilkan
		Jumlah paten yang telah dimanfaatkan di industri
		Persentase ANGGARAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERHADAP TOTAL APBD
		Persentase KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BERBASIS PRODUK UNGGULAN DAERAH terhadap jumlah penelitian
		Persentase jumlah peneliti di perguruan tinggi dan perangkat daerah kelitbangan dibanding hasil penelitian yang dipublikasikan
		Peringkat perguruan tinggi di daerah secara nasional
		Jumlah dunia usaha dan Industri yang memiliki unit penelitian dan pengembangan
		Jumlah Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah Kelitbangan

KATA KUNCI

PENINGKATAN NILAI INDEKS INOVASI DAERAH

1. KOMITMEN KEPALA DAERAH DAN SELURUH OPD UNTUK BERINOVASI MENUJU PERUBAHAN BUDAYA KERJA YANG BARU, DENGAN MERUBAH *MINDSET* YANG BEORIENTASI KEPADA *OUTCOME*, YANG DITUANGKAN KOMITMEN KINERJA YANG DITETAPKAN MELALUI PRODUK HUKUM DAERAH SERTA DI TINDAK LANJUTI DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH
2. BERANGKAT DARI PERMASALAHAN YANG TENGAH DIHADAPI DENGAN MELAKUKAN KAJIAN / RISET TERAPAN DENGAN REKOMENDASI YANG SOLUTIF DAN INOVATIF DAN MENGGUNAKAN SKALA PRIORITAS SEHINGGA BERDAMPAK BESAR BAGI MASYARAKAT (EX. MASALAH PENYEBAB UN EFISIENSI DAN UN EFEKTIFITAS)
3. LAKUKAN EVALUASI SECARA RUTIN DAN BERKALA MELALUI UJI COBA ATAU PENERAPAN INOVASI DAERAH SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN INOVASI (UPGRADING DAN UPDATING)
4. LAKUKAN SOSIALISASI KEPADA ASN DAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN *OUTCOME* INOVASI DAERAH YANG TELAH DITERAPKAN.
5. LIBATKAN MASYARAKAT DAN KOMUNITAS KREATIF YANG ADA DALAM RANGKA PERCEPAAN PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH (AKTOR INOVASI : ABCGF)
6. TINGKATKAN KEMAMPUAN ASN DENGAN MERUBAH *MINDSET* DALAM MEMECAHKAN PERMASALAHAN DAERAH DENGAN SOLUSI YANG INOVATIF.
7. TINGKATKAN FUNGSI DAN DAYA DUKUNG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI KELITBANGAN SEHINGGA SELURUH PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS *RESEARCH* (YANG DITUANGKAN DALAM RIK DAN DOKUMEN PERENCANAAN SERTA DOKUMEN ANGGARAN PEMDA).

STRATEGI 10 BESAR IID

1. KEBIJAKAN KDH YANG MEWAJIBKAN BERINOVASI BAGI SETIAP OPD
(MISAL : SATU OPD 3 INOVASI)
1. EVALUASI MENYELURUH DI SETIAP INOVASI YANG TELAH DITERAPKAN UNTUK PENGEMBANGAN (UPDATE & UPGRADE)
2. MARKETING DAN BRANDING INOVASI DAERAH → REPLIKASI DAN MENINGKATKAN NILAI MANFAAT YANG LEBIH INOVASI
3. REWARD BAGI INVENTOR
4. PEMANFAATAN PROPER DIKLATJAB ESSELON II/III/IV
5. PERBAIKAN MENEJEMEN INOVASI DAERAH MELALUI PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI KELITBANGAN
6. BERFIKIR SOLUTIF & INOVATIF DALAM MEMECAHKAN MASALAH

TERIMA KASIH



Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Jawa Barat

Jalan Kawalayaan Indah Raya Nomor 6 Kelurahan Jatisari Kecamatan Buah Batu

Telp : (022) 87328066 ; Fax : (022) 87327001

Email : bp2d.jabar@gmail.com

Website: www.bp2d.jabarprov.go.id



@bp2djabar



@bp2djabar



Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah